

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 35 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada selama tahun 2010 - 2011. Berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu terdapat 237 kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada tahun 2010-2011. Proses pemilihan sampel dalam penelitian ini disajikan pada table berikut..

TABEL 4.1.  
Proses Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
Kabupaten/kota yang melaksanakan pemilukada tahun 2010-2011	237
Data tidak tersedia secara lengkap selama tahun 2009-20011	(81)
Kabupaten/kota terpilih sebagai sampel	156

#### B. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif menyajikan nilai minimum, maksimum, *mean* dan standar deviasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

TABEL 4.2  
Statistik Deskriptif

Variabel	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviasi
Kelompok incumbent				
PBHt-1	0,000	0,195	0,03419	0,034123
PBBSt-1	0,001	0,095	0,01847	0,016599
PBBKt-1	0,000	0,268	0,03691	0,031745
PBHt0	0,006	0,151	0,05267	0,030665
PBBSt0	0,000	0,103	0,02115	0,019123
PBBKt0	0,000	0,200	0,04026	0,029761
RM	0,003	0,194	0,05965	0,038731
Kelompok non incumbent				
PBH	0,007	0,085	0,03746	0,019639
PBBS	0,004	0,099	0,02687	0,020138
PBBK	0,002	0,068	0,02898	0,016955
RM	0,002	0,160	0,04813	0,040937

Sumber: Hasil analisis data.

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa rasio belanja hibah sebelum pemilukada (PBHt-1) pada daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah memiliki rata-rata sebesar 0,03419 dengan deviasi standar 0,034123. Rasio belanja bantuan sosial sebelum pemilukada (PBBSt-1) memiliki rata-rata sebesar 0,01847 dengan deviasi standar 0,016599. Rasio belanja bantuan keuangan sebelum pemilukada (PBBKt-1) memiliki rata-rata sebesar 0,03691 dengan deviasi standar 0,031745. Rasio belanja hibah pada saat pemilukada (PBHt0) pada daerah pemilukada *incumbent* memiliki rata-rata sebesar 0,05267 dengan deviasi standar 0,030665. Rasio belanja bantuan sosial pada saat pemilukada (PBBSt0) memiliki rata-rata sebesar 0,02115 dengan deviasi standar 0,019123. Rasio

sebesar 0,04026 dengan deviasi standar 0,029751. Rasio kemandirian (RM) memiliki rata-rata sebesar 0,05965 dengan deviasi standar 0,038731.

Pada daerah pemelukada yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah, rasio belanja hibah (PBHt) memiliki rata-rata sebesar 0,03746 dengan deviasi standar 0,019639. Rasio belanja bantuan sosial (PBBS) memiliki rata-rata sebesar 0,02115 dengan deviasi standar 0,019123. Rasio belanja bantuan keuangan (PBBK) memiliki rata-rata sebesar 0,04026 dengan deviasi standar 0,029761. Rasio kemandirian (RM) memiliki rata-rata sebesar 0,05965 dengan deviasi standar 0,038731.

### C. Uji Asumsi Klasik

#### 1. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas menggunakan metode uji *One-Sample Kolmogorov-Smirnov (KS)* disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.3.  
Uji Normalitas

Persamaan	<i>KSZ Unstandardized Residual</i>	<i>p-value</i>	Keterangan
Pengaruh PBH, PBBS dan PBBK terhadap RM (incumbent)	1,237	0,094	Normal
Pengaruh PBH, PBBS dan PBBK terhadap RM (non incumbent)	0,987	0,284	Normal

Sumber : Hasil analisis data

Nilai *p-value* dari *KSZ unstandardized residual* pada kedua persamaan regresi masing-masing sebesar 0,284 dan 0,094 lebih besar dari

## 2. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas menggunakan metode *variance inflation factor* (VIF) disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.4.  
Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas	Collinearity Statistics		Kesimpulan
	Tolerance	VIF	
Pengaruh PBH, PBBS dan PBBK terhadap RM (Incumbent)			
PBH	0,963	1,038	Tidak terjadi multikolinearitas
PBBS	0,966	1,036	Tidak terjadi multikolinearitas
PBBK	0,936	1,069	Tidak terjadi multikolinearitas
Pengaruh PBH, PBBS dan PBBK terhadap RM (Non Incumbent)			
PBH	0,944	1,069	Tidak terjadi multikolinearitas
PBBS	0,978	1,023	Tidak terjadi multikolinearitas
PBBK	0,935	1,069	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.4 menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,1 atau nilai *variance inflation factor* (VIF) tidak ada yang lebih dari 10, berarti model regresi tidak terdapat multikolinearitas.

## 3. Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.5.  
Uji Heteroskedastisitas

Variabel Terikat	Variabel Bebas	<i>p-value</i>	Kesimpulan
Pengaruh PBH, PBBS dan PBBK terhadap RM (Incumbent)			
abse	PBH	0,616	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	PBBS	0,108	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	PBBK	0,202	Tidak terjadi heteroskedastisitas
Pengaruh PBH, PBBS dan PBBK terhadap RM (non Incumbent)			
abse	PBH	0,184	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	PBBS	0,272	Tidak terjadi heteroskedastisitas
	PBBK	0,086	Tidak terjadi heteroskedastisitas

Hasil perhitungan tabel 4.5 menunjukkan tidak ada satupun variabel bebas yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel terikat nilai absolute dari residual (abse), ditunjukkan oleh  $p\text{-value} > 0,05$ . Jadi dapat disimpulkan model regresi tidak menunjukkan adanya heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi tidak dilakukan dalam penelitian ini karena data yang digunakan untuk analisis adalah data *cross section* (satu kali pengamatan).

### D. Uji Hipotesis (Analisis Data)

#### 1. Uji Hipotesis 1, 2 dan 3

Uji hipotesis 1, 2 dan 3 digunakan uji dua sampel berpasangan, untuk mengetahui apakah rasio alokasi belanja hibah (PHB), rasio alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah **pada saat pelaksanaan** pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan **sebelum** pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah.

Sebelum dilakukan uji dua sampel berpasangan terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data guna menentukan jenis statistic yang

diikuti oleh uji parametric atau non parametric. Hasil uji normalitas



TABEL 4.7.

Hasil Uji *Wilcoxon* Perbedaan Rasio Alokasi Belanja Hibah (PHB) Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *Incumbent*-nya Mengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Saat dan Sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

	N	Mean Rank	Z	p-value	Makna
Negative Rank	21	45,57	-6,169	0,000	Berbeda
Positive Rank	88	57,25			
Ties	1				
Total	110				

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.7 menunjukkan terdapat 21 kabupaten/kota dengan hasil rasio alokasi belanja hibah sebelum pemilihan umum kepala daerah lebih rendah dibandingkan pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, 1 daerah tetap dan 88 daerah mempunyai alokasi belanja hibah lebih besar dari sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Hasil perhitungan statistik menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* diperoleh *p*-value sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$  berarti ada perbedaan yang signifikan alokasi belanja hibah pada daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan rasio alokasi belanja hibah pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 1 didukung.

b. Uji hipotesis 2

Hasil uji *Wilcoxon sign rank test* rasio alokasi belanja bantuan

1 (PPBS) daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-

nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah disajikan pada tabel berikut:

TABEL 4.8.

Hasil Uji *Wilcoxon* Perbedaan Rasio Alokasi Belanja Bantuan Sosial (PBBS) Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *Incumbent*-nya Mengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Saat dan Sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

	N	Mean Rank	Z	p-value	Makna
Negative Rank	37	54,70	-2,153	0,031	Berbeda
Positive Rank	66	50,48			
Ties	7				
Total	110				

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.8 menunjukkan terdapat 37 kabupaten/kota dengan hasil rasio alokasi belanja bantuan sosial pada saat pemilihan umum kepala daerah lebih rendah dari sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, 7 daerah tetap dan 66 daerah mempunyai alokasi belanja bantuan sosial lebih besar dari sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Hasil perhitungan statistik menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* diperoleh *p*-value sebesar  $0,031 < \alpha (0,05)$  berarti ada perbedaan yang signifikan alokasi belanja bantuan sosial pada daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan rasio alokasi belanja bantuan sosial pada saat pelaksanaan pemilihan umum



kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 2 didukung.

c. Uji hipotesis 3

Hasil uji *Wilcoxon sign rank test* rasio alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah disajikan pada table berikut:

TABEL 4.9.  
Hasil Uji *Wilcoxon* Perbedaan Rasio Alokasi Belanja Bantuan Keuangan (PBBK) Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *Incumbent*-nya Mengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah Pada Saat dan Sebelum Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah

	N	Mean Rank	Z	p-value	Makna
Negative Rank	32	48,78	-2,533	0,011	Berbeda
Positive Rank	62	46,84			
Ties	16				
Total	110				

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.9 menunjukkan terdapat 32 kabupaten/kota dengan hasil rasio alokasi belanja bantuan keuangan pada saat pemilihan umum kepala daerah lebih rendah dari sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, 16 daerah tetap dan 62 daerah mempunyai alokasi belanja bantuan keuangan lebih besar dari sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Hasil perhitungan statistik menggunakan uji *Wilcoxon Signed Rank Test* diperoleh *p-value* sebesar  $0,011 < \alpha (0,05)$  berarti ada perbedaan yang signifikan alokasi belanja

bantuan keuangan pada daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah pada saat pelaksanaan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 3 didukung.

## 2. Uji Hipotesis 4, 5 dan 6

Uji hipotesis 4, 5 dan 6 digunakan uji dua sampel independen, untuk mengetahui apakah rasio alokasi belanja hibah (PHB), rasio alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah.

Sebelum dilakukan uji dua sampel independen terlebih dahulu dilakukan uji normalitas data guna menentukan jenis statistic yang digunakan apakah parametric atau non parametric. Hasil uji normalitas

TABEL 4.10.  
Hasil Uji Normalitas Data

Variabel	KS-Z	P	Keterangan
PBH <i>incumbent</i>	1,303	0,067	Normal
PBH <i>non incumbent</i>	1,913	0,001	Tidak normal
PBBS <i>incumbent</i>	1,913	0,001	Tidak normal
PBBS <i>non incumbent</i>	0,760	0,610	Normal
PBBK <i>incumbent</i>	0,868	0,438	Normal
PBBK <i>non incumbent</i>	0,762	0,623	Normal

Sumber: Hasil analisis data

Hasil uji normalitas pada Tabel 4.10, dari 6 (enam) variable yang diteliti terdapat 2 variabel yang datanya tidak berdistribusi normal ditunjukkan dengan p-value < 0,05. Berdasarkan hasil uji normalitas di atas, maka uji dua sampel berpasangan yang digunakan untuk variable PBH dan PBBS adalah uji *Mann Whitney*, sedangkan variable PBBK menggunakan uji *independent sample t-test*.

a. Uji hipotesis 4

Hasil uji *Mann Whitney* rasio alokasi belanja hibah (PBH) daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dibandingkan dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah disajikan pada table berikut:

TABEL 4.11.  
Hasil Uji *Mann Whitney* Perbedaan Rasio Alokasi Belanja Hibah (PBH) Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *Incumbent*-nya Mengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *incumbent*-nya Tidak Mengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kelompok uji	Mean rank	Z	p-value
<i>Incumbent</i>	84,88	-2,729	0,000
<i>Non incumbent</i>	63,24		

Tabel 4.11 menunjukkan hasil uji *Mann Whitney* diperoleh *p*-value sebesar  $0,000 < \alpha (0,05)$  berarti ada perbedaan yang signifikan alokasi belanja hibah pada daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Nilai mean rank alokasi belanja hibah daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah sebesar 84,88 lebih besar dari daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah sebesar 63,24, hal ini menunjukkan rasio alokasi belanja hibah (PBH) daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 4 didukung.

b. Uji hipotesis 5

Hasil uji *Mann Whitney* rasio alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dibandingkan dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah disajikan pada table berikut:

TABEL 4.12.

Hasil Uji *Mann Whitney* Perbedaan Rasio Alokasi Belanja Bantuan Sosial (PBBS) Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *Incumbent*-nya Mengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *Incumbent*-nya Tidak Mmengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kelompok uji	Mean rank	Z	p-value
<i>Incumbent</i>	84,22	-2,448	0,014
<i>Non incumbent</i>	64,82		

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.12 menunjukkan hasil uji *Mann Whitney* diperoleh *p*-value sebesar  $0,014 < \alpha (0,05)$  berarti ada perbedaan yang signifikan alokasi belanja bantuan sosial pada daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Nilai mean rank alokasi belanja bantuan sosial daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah sebesar 84,22 lebih besar dari daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah sebesar 64,82, hal ini menunjukkan rasio alokasi belanja bantuan sosial daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang

## c. Uji hipotesis 6

Hasil uji *Independent sample t-test* rasio alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dibandingkan dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah disajikan pada table berikut:

TABEL 4.13.

Hasil Uji *Independent Sample t-tst* Perbedaan Rasio Alokasi Belanja Bantuan Keuangan (PBBS) Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *Incumbent*-nya Mengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah dengan Daerah Pemilihan Umum Kepala Daerah yang *Incumbent*-nya Tidak Mengikuti Kembali Pemilihan Umum Kepala Daerah

Kelompok uji	Mean	Mean diff.	p-value
<i>Incumbent</i>	0,04026	0,011285	0,017
<i>Non incumbent</i>	0,02898		

Sumber: Hasil analisis data

Tabel 4.13 menunjukkan hasil uji *Independent sample t-test* diperoleh *p-value* sebesar  $0,017 < \alpha (0,05)$  berarti ada perbedaan yang signifikan alokasi belanja bantuan keuangan pada daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Nilai mean alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah sebesar 0,04026 lebih besar dari daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali

pemilihan umum kepala daerah sebesar 0,02898, hal ini menunjukkan rasio alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 6 didukung.

### 3. Uji hipotesis 7a, 8a dan 9a

Pengujian hipotesis 7a, 8a dan 9a menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh alokasi belanja hibah (PBH), alokasi belanja bantuan social (PBBS) dan alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) terhadap kemandirian daerah di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah.

TABEL 4.14.  
Hasil Regresi Pengaruh PBH, PBBS dan PBBK terhadap RM

Variabel	Koef. Regresi	Prob (t-stat)	Keterangan
Konstanta	0,053	0,000	
PBH	0,115	0,358	Tidak signifikan
PBBS	-0,111	0,577	Tidak signifikan
PBBK	0,062	0,633	Tidak signifikan
Adj R <sup>2</sup>	-0,013		
F Statistic	0,520		
Prob (F-stat)	0,670		

Sumber : Hasil analisis data

Tabel 4.14 menunjukkan nilai koefisien regresi alokasi belanja

1.115 (PBH) dan -0,111 (PBBS) dan 0,062 (PBBK) dengan probabilitas (0,358), (0,577) dan (0,633) yang berarti rasio

alokasi belanja hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah (RM) di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 7a tidak didukung.

Nilai koefisien regresi alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) sebesar -0,111 dengan *p-value* (0,577) >  $\alpha$  (0,05), berarti alokasi belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah (RM) di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 8a tidak didukung.

Nilai koefisien regresi alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) sebesar 0,962 dengan *p-value* (0,633) >  $\alpha$  (0,05), berarti alokasi belanja bantuan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah (RM) di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 9a tidak didukung.

#### 4. Uji hipotesis 7b, 8b dan 9b

Pengujian hipotesis 7b, 8b dan 9b menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji pengaruh alokasi belanja hibah (PBH), alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) dan alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) terhadap kemandirian daerah di daerah pemilihan umum kepala



daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah.

TABEL 4.15.  
Hasil Regresi Pengaruh PBH, PBBS dan PBBK terhadap RM

Variabel	Koef. Regresi	Beta	Prob (t-stat)	Keterangan
Konstanta	-0,015		0,290	
PBH	0,587	0,282	0,032	Signifikan
PBBS	0,642	0,316	0,015	Signifikan
PBBK	0,838	0,347	0,010	Signifikan
R <sup>2</sup>	0,311			
F Statistic	7,760			
Prob (F-stat)	0,000			

Sumber : Hasil analisis data

Tabel 4.15 menunjukkan nilai koefisien regresi alokasi belanja hibah (PBH) sebesar 0,587 dengan *p-value* (0,032) <  $\alpha$  (0,05), berarti alokasi belanja hibah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah (RM) di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Peningkatan alokasi belanja hibah sebesar 1 satuan, maka kemandirian daerah akan meningkat sebesar 0,587 satuan. Hipotesis 7b didukung.

Nilai koefisien regresi alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) sebesar 0,642 dengan *p-value* (0,015) <  $\alpha$  (0,05), berarti alokasi belanja bantuan sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah (RM) di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Peningkatan alokasi belanja bantuan sosial sebesar 1 satuan, maka kemandirian daerah

Nilai koefisien regresi alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) sebesar 0,838 dengan  $p\text{-value}$   $(0,010) < \alpha$   $(0,05)$ , berarti alokasi belanja bantuan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian daerah (RM) di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Peningkatan alokasi belanja bantuan keuangan sebesar 1 satuan, maka kemandirian daerah akan meningkat sebesar 0,838 satuan. Hipotesis 9b didukung.

## 5. Uji hipotesis 10a, 10b dan 10c

Uji hipotesis 10a, 10b dan 10c digunakan uji chow untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh alokasi belanja bantuan hibah (PBH), alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) dan alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) terhadap kemandirian daerah antara daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah.

### a. Uji hipotesis 10a

Hasil uji chow untuk mengetahui perbedaan pengaruh alokasi belanja bantuan hibah (PBH) terhadap kemandirian daerah antara daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti

umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah diuraikan sebagai berikut:

Hasil perhitungan  $RSS_1$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,008	1	,008	4,922	,028 <sup>a</sup>
	Residual	,236	154	,002		
	Total	,243	155			

a. Predictors: (Constant), PBH

b. Dependent Variable: RM

Hasil perhitungan  $RSS_2$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,002	1	,002	1,116	,293 <sup>a</sup>
	Residual	,162	108	,001		
	Total	,164	109			

a. Predictors: (Constant), PBH

b. Dependent Variable: RM

Hasil perhitungan  $RSS_3$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,009	1	,009	5,644	,022 <sup>a</sup>
	Residual	,067	44	,002		
	Total	,076	45			

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{RSS_5/k}{RSS_4/N_1+N_2-2k}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,007/1}{0,229/110+46-2(1)}$$

$$= 4,707$$

Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 4,707 lebih besar dari F tabel 3,920 ( $df_1 = 1$ ;  $df_2 = 110+46-2$ ), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau ada perbedaan pengaruh alokasi belanja bantuan hibah (PBH) terhadap kemandirian daerah antara daerah pemilihan umum kepala daerah daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 10a didukung.

b. Uji hipotesis 10b

Hasil uji chow untuk mengetahui perbedaan pengaruh alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) terhadap kemandirian daerah antara daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah diuraikan sebagai berikut:

Hasil perhitungan  $RSS_1$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,001	1	,001	,441	,508 <sup>a</sup>
	Residual	,243	154	,002		
	Total	,243	155			

a. Predictors: (Constant), PBBS

b. Dependent Variable: RM

Hasil perhitungan  $RSS_2$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,000	1	,000	,267	,606 <sup>a</sup>
	Residual	,163	108	,002		
	Total	,164	109			

a. Predictors: (Constant), PBBS

b. Dependent Variable: RM

Hasil perhitungan  $RSS_3$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,009	1	,009	5,691	,021 <sup>a</sup>
	Residual	,067	44	,002		
	Total	,075	45			

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{RSS_5/k}{RSS_4/N_1+N_2-2k}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,013/1}{0,230/110+46-2(1)}$$

$$= 8,704$$

Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 8,704 lebih besar dari F tabel 3,920 ( $df_1 = 1$ ;  $df_2 = 110+46-2$ ), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau ada perbedaan pengaruh alokasi belanja bantuan sosial (PBBS) terhadap kemandirian daerah antara daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 10b didukung.

c. Uji hipotesis 10c

Hasil uji chow untuk mengetahui perbedaan pengaruh alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) terhadap kemandirian daerah antara daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali

Hasil perhitungan  $RSS_1$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,005	1	,005	3,561	,061 <sup>a</sup>
	Residual	,238	154	,002		
	Total	,243	155			

a. Predictors: (Constant), PBBK

b. Dependent Variable: RM

Hasil perhitungan  $RSS_2$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,000	1	,000	,322	,571 <sup>a</sup>
	Residual	,163	108	,002		
	Total	,164	109			

a. Predictors: (Constant), PBBK

b. Dependent Variable: RM

Hasil perhitungan  $RSS_3$ :

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,015	1	,015	10,901	,002 <sup>a</sup>
	Residual	,060	44	,001		
	Total	,075	45			

Sehingga besarnya F hitung dapat ditentukan sebagai berikut :

$$F_{hitung} = \frac{RSS_5/k}{RSS_4/N_1+N_2-2k}$$

$$F_{hitung} = \frac{0,015/1}{0,223/110+46-2(1)}$$

$$= 10,359$$

Nilai F hitung yang diperoleh sebesar 10,359 lebih besar dari F tabel 3,920 ( $df_1 = 1$ ;  $df_2 = 110+46-2$ ), sehingga dapat dikatakan model regresi tidak stabil atau ada perbedaan pengaruh alokasi belanja bantuan keuangan (PBBK) terhadap kemandirian daerah antara daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hipotesis 10c didukung.

## E. Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis pertama, kedua dan ketiga menunjukkan rasio alokasi belanja hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan rasio belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bantuan keuangan

sebelum pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Menurut Permendagri



Nomor 13 Tahun 2006, jenis belanja bantuan hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan merupakan bagian dari komponen belanja tidak langsung yang penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan serta tidak memiliki target kinerja tertentu, sehingga pengalokasiannya cenderung subyektif (adanya *political interest*) dan realisasi belanjanya didasarkan atas inisiatif dari Bupati/Walikota dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. Menurut Ritonga & Alam (2010), belanja hibah, belanja bantuan social dan belanja bantuan keuangan merupakan pos belanja yang dapat dipakai bagi calon *incumbent* untuk memikat hati masyarakat pemilih untuk mendapatkan dukungan suara, sehingga daerah yang melakukan pemilukada dengan calon *incumbent* akan mengalokasikan dana hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan lebih besar pada saat pemilukada dibandingkan dengan sebelum pemilukada. Hasil penelitian ini sesuai dengan Ritonga & Alam (2010) yang menyimpulkan bahwa alokasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan untuk daerah dengan calon *incumbent* pada saat pelaksanaan pemilukada lebih besar daripada sebelum pelaksanaan pemilukada.

Pengujian hipotesis keempat, kelima dan keenam menunjukkan rasio alokasi belanja hibah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah lebih besar dibandingkan dengan rasio alokasi belanja hibah daerah, rasio alokasi belanja bantuan sosial dan rasio alokasi belanja bantuan keuangan pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum

kepala daerah. Kepala daerah yang bermaksud mengikuti kembali pemilukada akan memperbesar rasio alokasi belanja tertentu yang mendukung kepentingannya. Menjelang pelaksanaan pemilukada, seorang kandidat membutuhkan dana besar untuk proses pencalonan dirinya, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh *incumbent* untuk meraih hati para pemilih melalui kampanye. Pos-pos belanja yang dapat dimanfaatkan oleh *incumbent* diantaranya adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial yang bersifat tidak mengikat/ tidak terus menerus dan diberikan secara selektif sesuai keputusan kepala daerah (Permedagri 59/2007). Berbeda dengan daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah, meskipun sama-sama memiliki kekuasaan, bukan berarti kepala daerah yang tidak maju kembali tidak mempunyai kepentingan politik, hanya saja kepala daerah tersebut tidak memanfaatkan belanja yang bersifat bantuan, melainkan untuk mencapai tujuan politiknya diperoleh melalui alokasi belanja yang sifatnya permanen, sehingga alokasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah tidak mengandung *lucrative opportunistic*. Hasil penelitian ini sesuai dengan Ritonga & Alam (2010) yang menunjukkan bahwa proporsi belanja hibah dan belanja bantuan sosial untuk daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah lebih besar daripada daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah pada saat pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah. Demikian juga dengan hasil penelitian Handayani (2010) yang menunjukkan

bahwa alokasi belanja hibah dan belanja bantuan keuangan kabupaten/kota yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilukada lebih besar daripada kabupaten/kota yang *incumbent*-nya tidak bermaksud untuk mengikuti kembali pemilukada.

Pengujian hipotesis 7a menunjukkan rasio alokasi belanja hibah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hasil yang tidak signifikan disebabkan belanja hibah tersebut oleh kepala daerah tidak dialokasikan ke pos-pos yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, namun lebih banyak digunakan untuk tujuan meraih hati para pemilih.

Pengujian hipotesis 7b menunjukkan rasio alokasi belanja hibah berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan layanan dasar umum. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya dengan belanja hibah yang besar pemerintah daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada

masyarakat sehingga akan tanpa tergantung bantuan dari pemerintah pusat sehingga kemandirian daerah semakin meningkat.

Pengujian hipotesis 8a menunjukkan rasio alokasi belanja bantuan sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hasil yang tidak signifikan disebabkan belanja bantuan sosial tersebut oleh kepala daerah tidak dialokasikan ke pos-pos yang dapat meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat, namun lebih banyak digunakan untuk tujuan meraih hati para pemilih.

Pengujian hipotesis 8b menunjukkan rasio alokasi belanja bantuan sosial berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Menurut Permendagri Nomor 32 Tahun 2008 pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada kelompok/anggota masyarakat namun tetap dilakukan secara selektif/tidak mengikat dan jumlahnya dibatasi dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Peningkatan kehidupan sosial ekonomi masyarakat akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah itu yang selanjutnya akan tercipta kemandirian daerah.

Pengujian hipotesis 9a menunjukkan rasio alokasi belanja bantuan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian daerah di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Hasil yang tidak signifikan disebabkan

belanja bantuan keuangan tersebut oleh kepala daerah tidak dialokasikan ke pos-pos untuk percepatan dan akselerasi pembangunan desa, namun lebih banyak digunakan untuk tujuan meraih hati para pemilih.

Pengujian hipotesis 9b menunjukkan rasio alokasi belanja bantuan keuangan berpengaruh positif terhadap kemandirian daerah di daerah pemilihan umum kepala daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dari pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa diarahkan untuk percepatan dan akselerasi pembangunan desa. Percepatan dan akselerasi pembangunan desa akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang selanjutnya akan menciptakan kemandirian daerah tersebut.

Pengujian hipotesis 10a, 10b dan 10c menunjukkan adanya perbedaan pengaruh rasio alokasi belanja hibah, rasio alokasi bantuan sosial dan rasio alokasi bantuan keuangan terhadap kemandirian daerah antara daerah yang *incumbent*-nya mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah dengan daerah yang *incumbent*-nya tidak mengikuti kembali pemilihan umum kepala daerah. Kepala daerah yang bermaksud mengikuti kembali pemilukada akan memperbesar alokasi belanja tertentu yang mendukung kepentingannya. Menjelang pelaksanaan pemilukada, seorang kandidat membutuhkan dana besar untuk proses pencalonan dirinya, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh *incumbent* untuk meraih hati para pemilih melalui kampanye. Berbeda dengan daerah non *incumbent*, meskipun sama-sama memiliki kekuasaan,

kepentingan politik, hanya saja kepala daerah tersebut tidak memanfaatkan belanja yang bersifat bantuan, melainkan untuk mencapai tujuan politiknya diperoleh melalui alokasi belanja yang sifatnya permanen, sehingga alokasi belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada daerah *non*